

# Bab I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap *CNN Effect* dan perannya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. CNN atau *Cable News Network* merupakan pusat informasi berita bagi masyarakat internasional yang berpusat di Amerika.<sup>1</sup> CNN mulai dibentuk dan diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1980 oleh penciptanya yaitu Ted Turner. Pada tahun 1985 CNN mulai memperluas cakupannya hingga ke internasional sebagai langkah untuk meningkatkan persaingannya.<sup>2</sup> CNN mempunyai tujuan yaitu untuk memperluas *newsgathering* ke tingkat internasional, dan menjadi jaringan televisi global utama untuk berita.<sup>3</sup> Hingga sekarang CNN merupakan televisi berita global yang telah tersebar lebih dari 200 negara.<sup>4</sup>

Karena besarnya jaringan CNN sebagai berita global di seluruh dunia, kemudian munculah *CNN effect* atau efek CNN, dimana efek CNN merupakan pemahaman bahwa kemampuan media berita dalam membentuk agenda kebijakan luar negeri negara.<sup>5</sup> Munculnya efek CNN membuktikan kepada dunia internasional bahwa media internasional mempunyai kekuatan untuk memunculkan suatu isu, atau memperbesar isu tersebut, membangun opini publik serta juga mempengaruhi kebijakan luar negeri negara.

---

<sup>1</sup> Rina Prasetyaningsih, *CNN Effect dalam Politik Global dan Masyarakat Global Amerika Serikat*, Fisip, Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm 18.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ole Holsti, *Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to Almond-Lippmann Consensus* *Mershonn Series: Research Programs and Debates in International Studies Quarterly*, Vol. 36, No. 4, 1992, hlm 20.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Eytan Gilboa, "Global Television News and Foreign Policy: Debating the CNN Effect", Dalam *International Studies Perspectives*, Vol. 6. 2005, hlm 12.

Contoh keberhasilan CNN dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika adalah dalam kasus kelaparan yang terjadi di Somalia pada tahun 2011.<sup>6</sup> Sepanjang tahun 2011 ada sekitar 260.000 warga somalia yang mati kelaparan, dan setengah dari jumlah itu yakni rata-rata anak yang berusia di bawah lima tahun.<sup>7</sup> CNN memberitakan bahwa salah satu penyebab terjadinya kasus kelaparan di Somalia adalah karena adanya intervensi dari Amerika. Dengan adanya pemberitaan secara terus – menerus oleh CNN, maka isu kelaparan Somalia mulai berkembang di Amerika dan internasional. Setelah berkembangnya isu tersebut kemudian muncul simpati dari masyarakat internasional yang berbentuk opini publik, dimana masyarakat internasional menuntut Amerika untuk memberikan bantuan terhadap kasus kelaparan di Somalia. Dengan adanya pemberitaan dari CNN, opini publik dan aksi – aksi protes dari masyarakat maka pada tahun 2012 Amerika mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan terhadap kasus kelaparan di Somalia.<sup>8</sup>

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa media dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Negara yang tadinya tidak mau memberikan bantuan berubah menjadi mau memberikan bantuan, karena pemberitaan dan tuntutan masyarakat yang disebabkan oleh media.

Denis McQuail dalam teori komunikasi massa menyatakan bahwa media dapat berperan terhadap perumusan kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>9</sup> Dimana ia menyatakan bahwa media dapat berperan sebagai sumber informasi bagi suatu negara. Sebab media merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat maupun pemerintah, dengan demikian maka media telah masuk didalam bagian input dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri sebagai sumber.

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa (Edisi Ke-2). Jakarta: Erlangga. 2005, hlm 11.

Selain itu Denis juga menyatakan bahwa pemberitaan media mampu untuk mengangkat suatu isu, sehingga kemudian muncullah opini publik terkait isu yang diangkat oleh media tersebut. Hingga akhirnya isu tersebut masuk kedalam agenda kebijakan luar negeri negara. Lingkungan media inilah yang dapat memengaruhi pembuat keputusan dan memaksa pembuat keputusan tersebut untuk merespon terhadap isu dan pendapat publik yang diangkat oleh media. Dalam *CNN Effect* media memiliki peran – peran tersebut hingga akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika.

Peran CNN dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika tersebut membuat peneliti tertarik untuk melihat apakah media massa di Indonesia juga berperan dalam kebijakan luar negeri Indonesia seperti yang diperlihatkan oleh *CNN Effect*, dan dalam penelitian ini media massa yang ingin diteliti yaitu Metro TV. Dalam penelitian ini kasus yang diangkat adalah kasus sengketa perbatasan Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 2005.

Peneliti mengangkat kasus Ambalat karena masalah perbatasan merupakan isu yang sangat sensitif bagi negara. Masalah perbatasan ini menjadi sensitif dikarenakan perbatasan merupakan batas-batas kedaulatan negara satu dengan negara lain yang akan selalu dipertahankan oleh negara. Apabila perbatasan ini terganggu maka akan dapat menimbulkan konflik dan ketegangan diantara negara-negara, selain itu isu perbatasan merupakan isu yang selalu mendapatkan tanggapan yang besar dari masyarakat, sehingga peran media sangat mungkin terjadi didalamnya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, kasus perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang menjadi sorotan utama didalam penelitian ini adalah kasus mengenai sengketa klaim Indonesia dan Malaysia di wilayah perairan Ambalat. Sebab Ambalat merupakan

---

<sup>10</sup> Suryo Sakti Hadiwijaya, Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 27.

wilayah yang sering menjadi pemicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia terkait masalah perbatasan.

Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 KM<sup>2</sup> yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makassar yang termasuk didalam wilayah kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan.<sup>11</sup> Masuknya Ambalat didalam wilayah Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur, perjanjian ini diratifikasi pada tanggal 7 November 1969.<sup>12</sup> Hal ini kemudian menjadi dasar hukum bahwa Ambalat berada di bawah kedaulatan Indonesia. Akan tetapi, letak geografis blok Ambalat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, membuat Indonesia dengan Malaysia sering mengalami konflik mengenai masalah perbatasan di Ambalat.

Konflik Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia berawal setelah disepakatinya Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia Malaysia pada tahun 1969, perjanjian ini membahas tentang batas – batas wilayah kedaulatan antara Indonesia dengan Malaysia, dimana pada perjanjian ini wilayah Ambalat masuk kedalam kekuasaan Indonesia.<sup>13</sup> Namun pada tahun yang sama setelah disepakati perjanjian tersebut Malaysia membuat peta baru yang memasukkan Ambalat, pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh ke dalam wilayahnya.<sup>14</sup>

Tentunya pembuatan peta baru ini membuat Indonesia bingung dengan tindakan yang dilakukan oleh Malaysia, sehingga kemudian Indonesia melakukan protes dan tidak mengakui peta baru yang dibuat oleh Malaysia. Sehingga untuk menanggapi tindakan Malaysia pada tanggal 17 Maret 1970 kembali ditandatangani Perjanjian Tapal Batas Laut

---

<sup>11</sup> Wahyono Suroto Kusumo, Indonesia Negara Mariti, Penerbit Teraju, Jakarta Selatan, 2009.

<sup>12</sup> Dikdik Mohamad Sodik. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung : Refika Aditama. 2011, hlm 14.

<sup>13</sup> Suryo Sakti Hadiwijaya. Perbatasan Negara dalam dimensi Hukum Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011, hlm 23.

<sup>14</sup> Ibid.



Indonesia Malaysia.<sup>15</sup> Namun pada tahun 1979 pihak Malaysia kembali membuat peta baru mengenai tapal batas kontinen dan maritim secara sepihak, dimana Malaysia memasukkan blok maritim Ambalat kedalam wilayah teritorialnya dengan memajukan koordinat wilayahnya melewati Pulau Sebatik.<sup>16</sup>

Indonesia melihat tindakan yang dilakukan oleh Malaysia sebagai perbuatan yang sangat serius yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Indonesia juga melihat tindakan yang dilakukan oleh Malaysia sebagai usaha untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah kedalam wilayah Indonesia. Malaysia juga beberapa kali mengirim kapal perangnya melewati batas kedaulatan Indonesia di perbatasan Ambalat, sehingga dengan adanya tindakan - tindakan dari Malaysia tersebut, maka memaksa Indonesia untuk menanggapi tindakan Malaysia dengan menempatkan beberapa kapal perang di Ambalat.<sup>17</sup>

Pada tahun 2005 sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia kembali memanas, dimana pada tahun ini banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia di wilayah Ambalat.<sup>18</sup> Pelanggaran yang pertama yang dilakukan oleh Malaysia yaitu Malaysia sering mengirim kapal patrolinya memasuki wilayah perairan Ambalat, hal ini tentunya sangat meresahkan bagi Indonesia karena Malaysia berulang kali mengirim kapal patrolinya memasuki wilayah perairan Ambalat. Selain itu kapal perang Malaysia juga sering memasuki wilayah perairan Ambalat. Pelanggaran lainnya adalah kapal patroli Malaysia juga pernah mengusir nelayan Indonesia yang sedang mencari ikan di wilayah Ambalat.<sup>19</sup> Hingga konflik memanas disaat terjadi insiden penyerempetan antara kapal patroli Malaysia dengan kapal patroli Indonesia di perairan Ambalat.<sup>20</sup> Pelanggaran –

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Himawan F, Ambalat Dalam Penetapan Batas Landas Kontinen, Mitra Media, Bandung, 2005, hlm 10.

<sup>17</sup> Tim Redaksi, Pulau – pulau terluar Indonesia, Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/III, 2004, hlm 8.

<sup>18</sup> Hikmahanto Juwana, Penyelesaian Damai Ambalat, Kompas, Jakarta, 2005, hlm 6.

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia ini yang kemudian memicu semakin memanasnya ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia terkait kasus Ambalat terutama pada tahun 2005.

Konflik-konflik tersebut membawa Ambalat ketingkat dinamika konflik paling tinggi pada tahun 2005.<sup>21</sup> Pada tahun 2005 konflik Ambalat menjadi konflik yang direspon secara serius oleh kedua negara. Dalam kasus sengketa Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia tahun 2005, media massa di Indonesia juga ikut memberitakan ketegangan konflik Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia.<sup>22</sup> Dimana pada tahun 2005 tersebut yang merupakan titik ketegangan tertinggi dalam kasus Ambalat ini, media massa di Indonesia sering kali memberikan berita - berita yang berisikan informasi seputar konflik antara Indonesia dengan Malaysia dalam sengketa Ambalat. Dalam hal jurnalistik sengketa yang terjadi diantara Indonesia dan Malaysia ini merupakan berita yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dimana didalam konflik tersebut terdapat kedaulatan wilayah dan juga harga diri bangsa.<sup>23</sup> Oleh karena itu, kasus Ambalat sering menjadi kepala berita dan sorotan utama di beberapa media massa di Indonesia. Sehingga dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut media menjadi sumber informasi bagi masyarakat Indonesia dalam memberitakan masalah politik internasional yang tengah dihadapi oleh Indonesia.

Salah satu media yang secara aktif memberitakan tentang konflik Ambalat adalah Metro TV. Dimana Metro TV menyajikan berita – berita seputar kasus Ambalat serta dinamika konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Selain itu Metro TV pada tahun 2005 juga merupakan stasiun televisi yang mempunyai rating tinggi sebagai televisi berita, oleh karena itu Metro TV merupakan televisi berita yang banyak dilihat oleh masyarakat

---

<sup>21</sup> Hikmahanto Juwana. Penyelesaian Damai Ambalat, dalam Kompas 11 April, Jakarta, 2005, hlm 21.

<sup>22</sup> Awaluddin Yussuf, Konflik Ambalat Nasionalisme dan Wacana Keberpihakan Media, UGM, 2012, hlm 6.

<sup>23</sup> Dedy Hidayat, Paradigma Perkembangan Penelitian Komunikasi, UNPAD, 2002.

Indonesia.<sup>24</sup> Metro TV juga sering memberitakan pelanggaran – pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Malaysia di wilayah Ambalat selama tahun 2005, serta bagaimana respon pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus Ambalat dengan Malaysia.<sup>25</sup> Jika dibandingkan dengan stasiun televisi swasta yang lain, Metro TV mempunyai 16 program berita yang mempunyai durasi hingga satu jam, sedangkan televisi swasta lain hanya mempunyai 4 program berita dalam waktu 24 jam dan hanya berdurasi 30 menit.<sup>26</sup> Dengan demikian Metro TV banyak memberikan informasi bagi masyarakat maupun pemerintah dalam melihat konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia di Ambalat.<sup>27</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini Metro TV dijadikan sebagai objek penelitian.

Dalam menanggapi konflik dengan Malaysia, berbagai kebijakan luar negeri dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus Ambalat tahun 2005.<sup>28</sup> Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat tiga tahapan hingga kebijakan itu dapat dibentuk. Yang pertama yaitu melihat sumber sebagai proses input, yang kedua menjadikan sumber tersebut menjadi kebijakan sebagai proses perumusan dan yang terakhir implementasi kebijakan sebagai proses output.<sup>29</sup> Di Indonesia, salah satu kementerian yang bertugas dalam merumuskan kebijakan luar adalah Kementerian Luar Negeri atau disingkat Kemlu. Kemlu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya Kemlu berfungsi dalam melakukan perumusan, penetapan, dan

---

<sup>24</sup> Husain Abdullah. “Analisis Framing Pemberitaan Metro TV Mengenai Kasus Ambalat”. Makassar. Universitas Hassanuddin. 2012, hlm 16.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ardiningtiyas Ptaloka. Peran Media Massa dalam Politik Indonesia. Jakarta : Snagar Rob. 2004, hlm 16.

<sup>28</sup> Luhur Hertanto, Tim Teknis RI-Malaysia Berunding Soal Ambalat, dalam <http://news.detik.com/read/2005/03/11/121520/315195/10/> tim-teknis-ri-malaysia-berunding-soal-ambalat, Diakses 27 Agustus 2015.

<sup>29</sup> Todorov, Alexander & Mandisodza, Anesu N. “Public Opinion on Foreign Policy: The Multilateral Public that Perceives Itself as Unilateral”, Dalam *Public Opinion Quarterly*, Vol. 68, 2004, hlm 14.

pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri.<sup>30</sup> Berdasarkan Undang-Undang (UU) RI No.39 Tahun 2008 Pasal 7 tentang Kementrian Negara, dijelaskan bahwa Kemlu berfungsi dalam perumusan kebijakan nasional serta hubungan dan kebijakan luar negeri.<sup>31</sup> Oleh karena itu dalam konflik Ambalat tahun 2005 Kemlu Indonesia bertugas dalam merumuskan kebijakan – kebijakan luar negeri Indonesia kepada Malaysia.

Tercatat ada sebanyak empat kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Indonesia terkait kasus Amabalat pada tahun 2005. Kebijakan tersebut antara lain adalah melayangkan nota protes, patroli militer di perairan Ambalat, pembangunan mercusuar dan perundingan diplomatik. Oleh karena itu kemudian tulisan ini mengambil waktu pada tahun 2005 sebagai tahun penelitian dengan melihat bagaimana kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Indonesia kepada Malaysia terkait kasus Ambalat.

Pada 12 April 2005 pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri mengirimkan nota protes resmi kepada Malaysia terkait peristiwa seringnya kapal perang Malaysia memasuki wilayah Ambalat.<sup>32</sup> Menurut Teuku Faizasyah, juru bicara Deplu, nota protes yang dikirim ke Malaysia bertujuan untuk menegaskan bahwa wilayah Ambalat adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu pengiriman nota protes ini juga bertujuan bahwa Indonesia memprotes keras pelanggaran kedaulatan yang telah dilakukan oleh Malaysia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, bahwa nota protes adalah kebijakan untuk mengaskan bahwa Ambalat adalah milik Indonesia.

Kebijakan luar negeri Indonesia selanjutnya adalah untuk membangun mercusuar di wilayah Karang Unarang yang telah dimulai semenjak 21 Februari 2005.<sup>33</sup> Kebijakan

---

<sup>30</sup> Aleksius Jemandu, Politik Global dalam Teori dan Praktek. Graha Ilmu : Yogyakarta, 2008, hlm 20.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 12.

<sup>33</sup> Dhani Ahmad. *RI akan Bangun 20 Mercusuar di KarangUnarang. 2005.* dalam <http://news.detik.com/read/2005/03/14/132230/316577/10/riakan-bangun-20-mercusuar-di-karang-unarang> [diakses 20 November 2015].



Indonesia untuk membangun mercusuar di wilayah Karang Unarang ini adalah karena wilayah Karang Unarang merupakan wilayah yang sering dilanggar oleh kapal Malaysia dan masuk ke wilayah Ambalat. Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Timur Laksamana Pertama Soeparmono mengatakan bahwa tujuan dibangunnya mercusuar di Karang Unarang adalah untuk menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai klaim politis atas wilayah Ambalat.<sup>34</sup>

Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005 mengenai kasus Ambalat adalah kebijakan untuk melakukan patroli militer di perairan Ambalat.<sup>35</sup> Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan perbatasan kedaulatan Indonesia di Ambalat. Kebijakan ini dikeluarkan mengingat banyaknya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Malaysia terkait masalah perbatasan di wilayah Ambalat, oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan patroli kapal di sekitar wilayah perairan Ambalat agar pelanggaran – pelanggaran yang telah dilakukan Malaysia tidak terulang lagi dan juga untuk melindungi penduduk Indonesia yang terdapat di wilayah Ambalat.

Eksekusi kebijakan luar negeri selanjutnya adalah dilakukannya tiga pertemuan tim teknis kedua negara untuk merundingkan batas-batas wilayah kedua negara.<sup>36</sup> Kebijakan perundingan ini didasari oleh orientasi menghindari penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian kasus Ambalat. Selain itu pertemuan ini juga membahas tentang kemungkinan penyelesaian kasus sengketa Ambalat melalui jalan damai. Terkait kebijakan ini, Juru Bicara Departemen Luar Negeri pada saat itu Marty Natalegawa menyatakan bahwa penggunaan cara - cara diplomatik tidak membuat Indonesia kemudian bersikap lunak terkait

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Jounil Kahar, Penyelesaian Batas Maritim NKRI . Jakarta : Pikiran Rakyat. 3 Januari 2004.

<sup>36</sup> Juwana, Hikmahanto. Penyelesaian Damai Ambalat, dalam Kompas 11 April, Jakarta, 2005, hlm 7.

kedaulatan Ambalat, wilayah Ambalat tetap dipertahankan di dalam kedaulatan Indonesia.<sup>37</sup> Sehingga dapat dilihat bahwa walaupun menempuh jalur diplomatik, tujuan akhirnya yaitu tetap untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa CNN telah berhasil mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika dalam kasus kelaparan yang ada di Somalia pada tahun 2011. Dimana isu yang diangkat oleh CNN mengundang simpati masyarakat Amerika dan Internasional yang kemudian menimbulkan lahirnya opini publik. Dengan adanya pemberitaan dari CNN dan opini publik yang mendesak pemerintah Amerika, akhirnya Amerika mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan kepada Somalia pada tahun 2012.<sup>38</sup> Selain itu juga menurut Chanan Naveh media dapat berperan sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan juga berperan dalam mempublikasikan kebijakan yang telah dihasilkan oleh pemerintah kepada masyarakat.<sup>39</sup> Maka berdasarkan hal – hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah media massa di Indonesia yaitu Metro TV juga mempunyai peran terhadap kebijakan luar negeri Indonesia kepada Malaysia dalam kasus Ambalat tahun 2005 mengacu kepada apa yang diperlihatkan oleh CNN dalam *CNN effect*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menganalisis peran media terhadap kebijakan luar negeri sebuah negara, isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah masalah perbatasan Ambalat. Konflik Ambalat diawali setelah Malaysia membuat peta sendiri yang memasukan wilayah perairan Ambalat secara sepihak setelah disepakatinya perjanjian Tapal Batas Kontinen pada tahun 1969 antara

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Eytan Gilboa, “Global Television News and Foreign Policy: Debating the CNN Effect”, Dalam *International Studies Perspectives*, Vol. 6. 2005, hlm 20.

<sup>39</sup> Chanan Naveh, “The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework”, Dalam *Conflict and Communication Online*, Vol. 2, No. 1, 2002, hlm 15.

Indonesia dengan Malaysia. Konflik antara Indonesia dengan Malaysia terkait Ambalat terus berlanjut hingga tahun 2005. Pada tahun 2005 konflik Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia berada pada tingkat ketegangan paling tinggi dengan sering terjadinya permasalahan di sekitar perbatasan Ambalat. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut Indonesia mengambil tindakan dengan membuat empat kebijakan luar negeri terhadap Malaysia pada tahun 2005 terkait masalah Ambalat. Kebijakan tersebut adalah melayangkan nota protes, pembangunan mercusuar, patroli militer dan perundingan. Selama tahun 2005 Metro TV ikut berperan aktif dalam memberitakan seputar masalah Ambalat. Sehingga merujuk pada keberhasilan *CNN effect*, peneliti tertarik untuk melihat apakah Metro TV juga berperan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat tahun 2005.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian.**

Berdasarkan tema yang telah diusung sebelumnya, maka dalam pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah “Apakah Metro TV berperan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia kepada Malaysia dalam kasus Ambalat tahun 2005?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah Metro TV berperan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia kepada Malaysia dalam kasus Ambalat tahun 2005.”

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional mengenai peran media, khususnya Metro TV terhadap perumusan kebijakan luar negeri Indonesia kepada Malaysia dalam kasus Ambalat tahun 2005, dimana penelitian ini termasuk dalam kajian Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk mahasiswa, dosen, masyarakat, dan penulis untuk menambah pengetahuan mengenai peran Metro TV terhadap perumusan kebijakan luar negeri Indonesia kepada Malaysia dalam kasus Ambalat tahun 2005.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai studi pustaka kedalam penelitian ini yang dijadikan sebagai referensi bagi penulis. Yang pertama yaitu sebuah jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Media Terhadap Opini Publik Dalam Kasus Ambalat” yang ditulis oleh Iwan Awaluddin Yusuf.<sup>40</sup> Dalam penelitiannya Iwan menyatakan bahwa media memiliki sifat yang subjektif dalam merangkum visi, misi, ideologi, dan nilai yang hendak mereka berikan kepada masyarakat. Dalam hal ini media berada dalam tiga bentuk kemungkinan yaitu positif, netral, dan negatif. Selain itu media juga menunjukkan adanya keberpihakan di dalam pemberitaan yang disampaikan. Hal yang paling mendasar dalam keberpihakan dari suatu objek dapat dilihat apakah mereka mendukung atau tidak mendukung.

Yang kedua yaitu sebuah penelitian yang berjudul “Konstruksi Identitas dan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Kasus Sengketa Ambalat Tahun 2005” yang ditulis oleh Dias Pambyantara.<sup>41</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh identitas dalam politik luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat tahun 2005. Dalam penelitian ini penulis berargumen bahwa politik luar negeri Indonesia pada kasus Ambalat tahun 2005 dilatar belakangi oleh identitas kepulauan dan pendukung perdamaian dunia. Tulisan ini terbagi dalam dua bagian, yang

---

<sup>40</sup> Awaluddin Yussuf, *Konflik Ambalat Nasionalisme dan Wacana Keberpihakan Media*, UGM, 2012.

<sup>41</sup> Dias Pabyantara, “Konstruksi Identitas dan Politik Indonesia dalam Sengketa Ambalat 2005”, UNAIR, FISIP, 2005.



pertama yaitu berargumen bahwa konstruksi identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara pendukung perdamaian dunia diartikulasikan secara historis dan normatif oleh pemimpin yang berkuasa mulai dari Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Bagian kedua membahas artikulasi kedua identitas tersebut sebagai latar belakang pengambilan keputusan dalam politik luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat tahun 2005. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa konstruksi identitas Indonesia mempengaruhi dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat 2005.

Yang ketiga yaitu penelitian yang berjudul “Perkembangan CNN dan internet dalam mempengaruhi Diplomasi Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat” yang ditulis oleh Ayu Rahmah.<sup>42</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana informasi melalui internet membuat dunia menjadi lebih dekat satu sama lain secara elektronik maupun budaya. Efek demokratisasi pun bisa diciptakan oleh media massa dan satelit yang menghubungkan setiap sudut di dunia ini. Bahkan masalah kecil bisa menjadi isu kebijakan mayor jika ditangkap oleh pers, hal ini biasa disebut “efek CNN”. Kekuatan global dari penyiaran berita secara langsung ini menjadi sebuah tantangan tersendiri terhadap hubungan masyarakat dan pemerintah dalam hal publikasi. Internet pun sebagai salah satu media dengan harga yang saat ini relatif terjangkau dalam mendapatkan informasi. Kemampuan media dalam membangun opini publik memberikan fakta baru bagi sistem internasional bahwa media membawa pengaruh yang besar bagi eksistensi sebuah negara. Adanya informasi yang didapat di media menunjukkan bahwa informasi tersebut menjadi kekuatan besar media untuk tidak diabaikan. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari jika media dapat menjatuhkan citra aktor maupun negara tertentu dengan hanya sekali pemberitaan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk bagaimana kolaborasi dari perkembangan internet dan CNN dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika didalam era globalisasi.

---

<sup>42</sup> Ayu Rahmah, “Perkembangan CNN dan internet dalam mempengaruhi Diplomasi Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat”, Universitas Semarang, 2010.

Yang keempat penelitian yang berjudul “Opini Publik dan Kebijakan Luar Negeri : Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan Oleh Presiden” yang ditulis oleh Muhammad Hafiz.<sup>43</sup> Penelitian ini mengkaji apakah presiden menjadikan opini publik sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan luar negeri. Untuk menjelaskan pengaruh ini, ia menggunakan konsep lima tingkatan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh presiden, yaitu *representation, option generation, policy selection, implementation dan policy review*, yang dalam setiap tingkatnya presiden merespon ragam opini publik yang fluktuatif. Dengan menggunakan analisis masa krisis dan non-krisis terhadap 34 kasus kebijakan luar negeri, penelitian ini menemukan adanya “siklus perhatian persoalan” dalam kebijakan luar negeri secara sistematis, sehingga dengan penemuannya tersebut dapat diprediksi dalam kondisi-kondisi apa saja opini publik itu akan sangat memengaruhi pengambilan keputusan sebuah kebijakan atau tidak.

Yang kelima penelitian yang berjudul “CNN Effect dalam Politik Global dan Masyarakat Global Amerika Serikat” oleh Rina Prasetyaningsih dari, Universitas Brawijaya Malang.<sup>44</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana CNN dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri Amerika dengan contoh kasus Somalia. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang dipakai adalah kerangka pemikiran dari *CNN effect*. Dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana media massa dapat berperan terhadap agenda setting pemerintah dalam pembentukan kebijakan luar negeri yang didasari melalui kerangka pemikiran *CNN effect*.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### ***1.7.1 The Role of Media in Foreign Policy Making***

---

<sup>43</sup> Muhammad Hafiz, “Opini Publik dan Kebijakan Luar Negeri : Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan Oleh Presiden”, Universitas Hassanuddin, Makassar, 2012.

<sup>44</sup> Rina Prasetyaningsih, “CNN Effect dalam Politik Global dan Masyarakat Global Amerika Serikat”, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep “ *The Role of Media in Foreign Policy Making*” oleh Chanan Naveh. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri pada dasarnya terdapat tiga tahapan utama dalam proses pembuatannya, yang pertama yaitu sumber kebijakan luar negeri sebagai input, yang kedua proses menjadikan sumber – sumber tersebut sebagai sebuah kebijakan sebagai perumusan, dan yang terakhir implementasi dari kebijakan itu sendiri sebagai output.<sup>45</sup> Dalam tahapan pembuatan kebijakan luar negeri ini Naveh menjelaskan bahwa media berperan di dalam dua tahap, yang pertama yaitu tahap input dan yang kedua tahap output. Naveh menjelaskan bahwa di dalam tahap input pembuatan kebijakan luar negeri, media berperan sebagai sumber informasi dan berperan dalam membentuk opini publik, pada tahap output Naveh menjelaskan bahwa media berperan sebagai alat dalam mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat kepada masyarakat.

Sumber – sumber utama yang menjadi input dalam pembuatan kebijakan luar negeri terbagi atas empat sumber, yaitu *external sources*, *societal sources*, *governmental sources*, dan *role sources*.<sup>46</sup> *External sources* merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan antar negara, dan situasi eksternal antar negara yang dapat berupa isu-isu tertentu. *Societal sources* adalah sumber yang berasal dari lingkungan internal negara. Sumber ini mencakup faktor budaya, sejarah, dan struktur sosial. *Governmental sources* merupakan sumber dari pemerintah maupun struktur dalam pemerintah. *Role sources* merupakan sumber dari lembaga-lembaga yang mempunyai peran penting yang dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan opini publik, salah satu contoh sumber ini adalah media massa. Menurut Naveh disinilah media berperan sebagai sumber input, dimana para pembuat kebijakan luar negeri dapat mempelajari berbagai peristiwa yang terjadi didalam negara maupun sistem internasional melalui pers, dan

---

<sup>45</sup> Chanan Naveh dalam Snyder, “The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework”, *Conflict and Communication Online*, Vol. 2, No. 1, 2002, hlm 8.

<sup>46</sup> Ibid.

juga sebagai pesan yang masuk dari arena politik melalui saluran komunikasi publik atau media.<sup>47</sup>

Naveh menjelaskan bahwa media termasuk ke dalam *Role Sources* sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran penting didalam negara, sebab media merupakan sumber informasi bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah. Dalam hal ini media dengan beritanya memberikan informasi – informasi terkait isu yang dipermasalahkan kepada masyarakat dan juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Oleh karena itu Naveh memasukkan media kedalam *Role Sources* sebagai salah satu dari sumber input dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara.

Berdasarkan aspek tahapan utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilihat peran media didalamnya. Dalam aspek yang pertama, yaitu sumber kebijakan luar negeri, media turut serta sebagai sumber input, dimana para pembuat kebijakan luar negeri dapat mempelajari berbagai peristiwa yang terjadi dalam sistem internasional melalui pemberitaan media.<sup>48</sup> Sebab melalui pemberitaan media para pembuat kebijakan dapat memperoleh informasi – informasi mengenai isu yang sedang dibahas. Serta melalui pemberitaan media para pembuat kebijakan dapat melihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang.

Media yang secara terus menerus memberitakan suatu isu, maka isu tersebut kemudian akan berkembang di masyarakat. Setelah isu tersebut berkembang di masyarakat maka terbentuklah opini publik. Naveh menjelaskan bahwa opini publik terbentuk dari media dan juga tersampaikan melalui media, yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan

---

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa (Edisi Ke-2), Erlangga, Jakarta, 2005, hlm 15.



bagi para pembuat keputusan.<sup>49</sup> Oleh karena itu, Naveh menyatakan bahwa opini publik dan media memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Naveh juga menyatakan bahwa kebijakan luar negeri yang baik adalah kebijakan yang menyertakan unsur opini publik yang mendukung pembuatan kebijakan didalamnya.<sup>50</sup>

Setiap tindakan dan sikap suatu negara pasti mendapat respon opini dari masyarakat domestik baik positif maupun negatif. Bagi suatu negara adanya opini publik ini cukup mempengaruhi dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan dengan adanya opini positif dari publik, tentu semakin meningkatkan pengesahan kebijakan yang dikeluarkan negara tersebut.<sup>51</sup> Negara tentu akan semakin percaya diri dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya dengan adanya dukungan publik tersebut. Oleh karena itu, opini publik berperan sebagai sumber pendukung dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.

Naveh menjelaskan bahwa media juga mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi pembentukan opini publik terhadap kebijakan luar negeri.<sup>52</sup> Media adalah hal yang mampu untuk mempengaruhi paradigma, perspektif dan opini publik. Media dengan mudah dapat mempengaruhi masyarakat dalam membentuk opini baik maupun buruk terhadap kebijakan yang dikeluarkan negara tersebut. Selain itu, media inilah yang nantinya akan menyalurkan opini publik hingga akhirnya diketahui oleh para pembuat kebijakan.<sup>53</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan apabila media merupakan sumber dari lahirnya opini publik.

---

<sup>49</sup> Chanan Naveh, "The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework", Dalam *Conflict and Communication Online*, Vol. 2, No. 1, 2002, hlm 5.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Nurma, Cintya Juwita. Peran Media Massa di Amerika Serikat Dalam Mempengaruhi Invasi ke Irak Tahun 2003. FISIP, Universitas Udayama. 2010. Hlm 1-12.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Larson, Jared & Juliette Tolay "Public Opinion and Media on the War in Iraq: A Check on the Executive?" *Northeastern Political Science Public Opinion & the Rhetorical Arts of Leadership*. 2010. hlm 80.

Dalam membentuk opini publik media berperan sebagai instrumen dalam membentuk opini di masyarakat.<sup>54</sup> Opini publik dan media bahkan mampu mempengaruhi dan mengubah kebijakan suatu negara. Contoh kasus pengaruh opini publik dan media dapat terlihat ketika CNN dalam *CNN Effect* berhasil mempengaruhi Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan luar negeri terkait kasus kelaparan di Somalia.<sup>55</sup> Pemerintah Amerika memilih untuk melakukan intervensi dalam peperangan yang tengah terjadi di Somalia, namun kebijakan ini ternyata tidak direspon baik oleh publik Amerika. Hal ini tentu membuat kebijakan luar negeri Amerika tidak memiliki legitimasi penuh dan mempertimbangkan opini publik tersebut. Hingga pada akhirnya pemerintah memilih untuk mengubah kebijakan luar negeri dengan memberikan bantuan makanan kepada Somalia.

Melalui kasus tersebut Efek CNN memperlihatkan adanya dampak dari penyiaran berita yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Sebab dengan adanya pemberitaan – pemberitaan dari CNN memberi dampak timbulnya opini publik. Dengan adanya opini publik, kemudian mendorong publik untuk melakukan aksi kepada pemerintah atas berita yang ditayangkan, dengan adanya opini publik dan aksi-aksi dari masyarakat kemudian pemerintah merespon dengan mengeluarkan kebijakan.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, dalam pembentukan opini publik terhadap pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat peran media di belakangnya dengan cara menayangkan berita atas suatu isu secara terus menerus yang kemudian dapat melahirkan opini publik atas berita diangkat oleh media, sebab media mempunyai kekuatan untuk menentukan isu mana yang akan sering diberitakanya dan dengan seringnya suatu isu diberitakan kemudian dapat menimbulkan opini

---

<sup>54</sup> Neack, Laura. Public Opinion and Media. in *The New Foreign Policy power seeking in a globalized era* second edition. New York: Rowman & Littlefield Publishers. 2008. Inc. Pp 111 – 28

<sup>55</sup> Eytan Gilboa. “Global Television News and Foreign Policy: Debating the CNN Effect”. Dalam *International Studies Perspectives*, Vol. 6. 2005, hlm 17-50.

<sup>56</sup> Holsti, Ole. *Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to Almond-Lippmann Consensus* Mershonn Series: Research Programs and Debates in International Studies Quarterly, Vol. 36, No. 4. 1992.

publik terhadap isu yang sering diberitakan tersebut.<sup>57</sup> Opini publik ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu alat bagi para pembuat kebijakan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Pada tahap output media berperan sebagai alat publikasi, dimana media berperan sebagai alat publikasi atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.<sup>58</sup> Dalam hal ini media berperan dalam memberitakan atau mempublikasikan kebijakan apa yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menanggapi suatu isu kepada masyarakat luas. Oleh karena itu media juga berperan sebagai alat publikasi.

Namun dalam proses input pembuatan kebijakan luar negeri, peran media sebagai sumber dan membentuk opini publik tidak selalu dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam setiap kasus atau isu dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini biasanya dilakukan oleh negara otoriter dimana kebebasan pers dan berekspresi sangat dibatasi. Namun, ada kalanya ketika pemerintah negara non-otoriter atau demokrasi sekalipun mengambil kebijakan yang bertentangan dengan opini publik, terutama disaat negara tersebut berada dalam kondisi krisis.<sup>59</sup> Contohnya adalah kebijakan Amerika dalam *War on Terror*, dimana setelah kejadian terorisme 9 September 2001 presiden Amerika menyatakan kebijakan untuk memerangi terorisme, walaupun kebijakan ini banyak mendapatkan pertentangan dari masyarakat internasional sebab secara tidak langsung kebijakan ini membuat terdeskriminasinya umat Islam, terutama umat Islam yang berada di Amerika. Dalam kebijakan ini opini publik tidak lagi menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

---

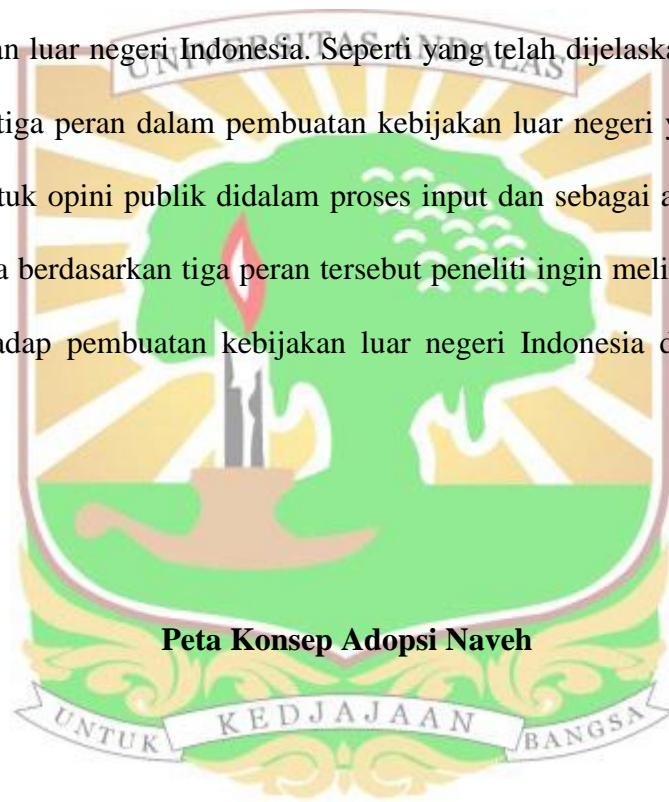
<sup>57</sup> Larson, Jared & Juliette Tolay "Public Opinion and Media on the War in Iraq: A Check on the Executive?" *Northeastern Political Science Public Opinion & the Rhetorical Arts of Leadership*. 2010. hlm 83.

<sup>58</sup> Putra, I Gusti Ngurah (Ed), *Media, Komunikasi, dan Politik: Sebuah Kajian Kritis*, FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2008.

<sup>59</sup> Holsti, Ole. *Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to Almond-Lippmann Consensus* *Mershon Series: Research Programs and Debates dalam International Studies Quarterly*, Vol. 36, No. 4. 1992.

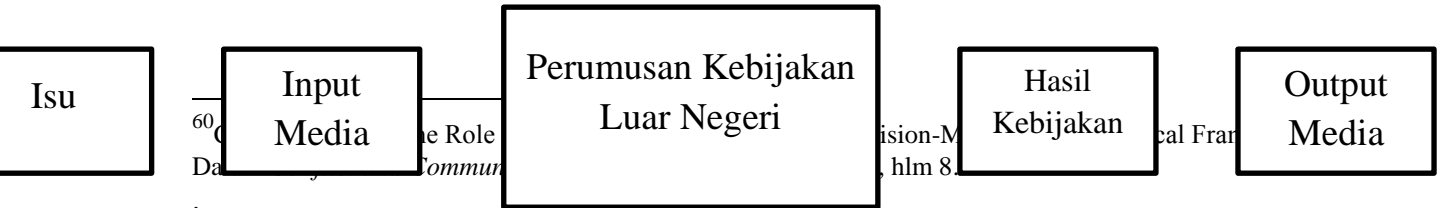
Sementara dalam proses output Naveh menjelaskan bahwa media berperan sebagai alat publikasi.<sup>60</sup> Media berperan melalui pemberitaanya terhadap hasil kebijakan luar negeri yang telah dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, dengan pemberitaan ini maka media berperan dalam memberikan informasi atas kebijakan apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap suatu isu kepada masyarakat.

Oleh karena itu dengan menggunakan konsep *The Role of Media in Foreign Policy* oleh Chanan Naveh ini, peneliti ingin melihat apakah Metro TV juga berperan terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh Naveh bahwa media mempunyai tiga peran dalam pembuatan kebijakan luar negeri yaitu, sebagai sumber informasi, membentuk opini publik didalam proses input dan sebagai alat publikasi didalam proses output. Maka berdasarkan tiga peran tersebut peneliti ingin melihat apakah Metro TV juga berperan terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus Ambalat tahun 2005.



**Peta Konsep Adopsi Naveh**

Peran Media Terhadap Kebijakan Luar Negeri







didiskripsikan, jelaskan, dan ramalkan, sedangkan level analisa adalah cara untuk mengidentifikasi fenomena yang akan diobservasi di berbagai tempat.<sup>61</sup> Patrick Morgan dalam Masaid menyebutkan ada lima level analisis yaitu individu, kelompok individu, negara bangsa, kelompok negara, dan sistem internasional. Penelitian yang penulis bahas yaitu mengenai peran Metro TV terhadap kebijakan luar negeri Indonesia kepada Malaysia dalam kasus Ambalat 2005. Oleh karena itu unit analisisnya adalah media (Metro TV) dan level analisisnya adalah negara.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data data sekunder. Data diambil dengan mencari studi literatur yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, selain itu sumber data primer juga diambil dari media internet melalui situs-situs resmi dengan kata kunci yang berkaitan dengan tema dan masalah yang ada dalam penelitian ini. Untuk data pendukung peneliti mengambil data dari jurnal makalah ilmiah dan penelitian ilmiah yang memiliki tema yang serupa dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik penyajian data. Teknik ini bertujuan untuk melakukan pengamatan, pengumpulan data, dan pelaporan hasilnya. Teknik juga dapat digunakan untuk menghasilkan atau menguji hipotesis. Teknik analisa data dalam penelitian ini berangkat dari keberhasilan Peneliti menggunakan konsep *The Role of Media in Foreign Policy* oleh Chanan Naveh dalam menganalisis peran Metro TV terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

---

<sup>61</sup> Mochtar Masaid, Ilmu Hubungan Internasional Disipin dan Metodologi, Jakarta, hlm 4, 1994.

BAB I :

Pendahuluan (Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian).

BAB II :

Konflik Ambalat dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Malaysia dalam Kasus Ambalat.

BAB III :

Pemberitaan Metro TV terhadap Kasus Ambalat.

BAB IV :

Analisis Peran Metro TV terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Ambalat 2005.

BAB V :

Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

